



ပိတိကိန္နုဂျပာပိကျိတပိ
PEMERINTAH PROVINSI BALI
 ဆိုကမိကုကောယုဆိကမိ၊ တူကဆိဝါယဖိကော ဆကါ မ္မူဖိမ္မိကါ
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
 ကမိကုကောယုပတ္တပိကမိကုကောယုကမိ (ပဝတ္တုတု) ကမိကုကောယုကမိ (ဝတ္တက)၊ တူကဆိဝါ
 JALAN D.I. PANJAITAN NOMOR 7, DENPASAR (80235) BALI, TELEPON (0361) 225859
 website : www.diskominfos.baliprov.go.id , email : diskominfos@baliprov.go.id

RINGKASAN LAPORAN TAHUNAN PPID UTAMA PEMERINTAH PROVINSI BALI
TAHUN : 2021

No	Bulan Register Permohonan Informasi	Jumlah Permohonan Informasi	Waktu yang diperlukan menjawab permohonan	Permohonan informasi yang dikabulkan	Permohonan informasi ditolak	Permohonan Keberatan	Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi			Ket.
							KI	PTUN	MA	
1	Januari	5	1-4 hari	5	-	-	-	-	-	-
2	Pebruari	5	1-2 hari	5	-	-	-	-	-	-
3	Maret	4	1-5hari	4	-	-	-	-	-	-
4	April	15	2-4 hari	14	1	-	-	-	-	-
5	Mei	1	1-5 hari	1	-	-	-	-	-	-
6	Juni	13	1-6 hari	13	-	-	-	-	-	-
7	Juli	7	1-6 hari	7	-	-	-	-	-	-
8	Agustus	12	5-10 hari	12	-	-	-	-	-	-
9	September	14	1-4 hari	14	-	-	-	-	-	-
10	Oktober	9	1-5 hari	9	-	-	-	-	-	-
11	Nopember	12	3-7 hari	12	-	-	-	-	-	-
12	Desember	7	1-5 hari	7	-	-	-	-	-	-

Bali, 31 Desember 2021


 Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS
Gede Pramana
 NIP. 19680531 199703 1 002

Denpasar, 5 April 2021

Kepada Yth

Gede Pramana, ST, MT.

Kepala Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Provinsi Bali

Jl. Panjaitan No.7, Sumerta Kelod, Denpasar Selatan

Perihal : **Dukungan Kerjasama Telkomsel untuk SMS Blast, Program ASN, Pendidikan, Kesehatan & Pariwisata**

Lampiran : 2 berkas

Dengan hormat,

Menindaklanjuti MOU dengan Bapak Wakil Gubernur pada Tanggal 10 Maret 2021 lalu terkait program dukungan Telkomsel untuk Pemerintah Provinsi Bali, maka berikut kami informasikan detail produk yang akan kami serahkan beserta dokumen yang kami butuhkan untuk administratif internal sbb:

1. Jumlah SMS yang diberikan sebanyak 56.569 SMS selama periode 30 hari (masking sender 11 karakter, wording/isi SMS sebanyak 160 karakter) dimana masking dapat dibuat sesuai kebutuhan campaign missal SATGASCOVID, SATGASBDG, ataupun karakter lainnya sesuai kebutuhan selama tidak lebih dari 11 karakter. Sedangkan untuk isi SMS pun dapat disesuaikan sesuai kebutuhan informasi selama tidak lebih dari 160 karakter.
2. Selain dokumen KB dengan system Free Of Charge yang telah di tandatangani sebelumnya, terkait program untuk ASN, kami mohon pula bantuannya untuk list nomor ASN (Aparatur Sipil Negara) melalui BKD yang ada di Pemerinta Provinsi Bali, untuk dapat kami list dan daftarkan dalam Program ASN sehingga nantinya apabila dibutuhkan oleh para ASN sudah langsung dapat didaftarkan mandiri (tidak ada keterikatan/kewajiban untuk program tersebut) dimana dalam program tersebut tidak ada paksaan ataupun biaya yang dibebankan ke Dinas, dan untuk aktivasi paket nantinya apabila dibutuhkan, untuk pembiayaan dilakukan dengan system pembelian pulsa personal oleh masing-masing ASN.

Demikian surat ini kami sampaikan, besar harapan kami untuk pengajuan diatas dapat untuk ditindaklanjuti sehingga dukungan kami terutama untuk SMS Blast dapat untuk segera ditindaklanjuti dan disampaikan kepada masyarakat.

Hormat Kami,

PT TELEKOMUNIKASI SELULAR



S. Handoyo Hadi

General Manager SME Sales Management East Area



Bali, 6 April 2021

Nomor : 120.1/5321/IKP/D.KOMINFOS
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Jawaban Permohonan Data

Yth. Kepada
General Manager SME
Sales Management East
Area, PT Telekomunikasi
Selular

di –
Denpasar

Menanggapi surat saudara Tanggal 5 April 2021 point 2 (dua), tentang permohonan list nomor telepon ASN Pemerintah Provinsi Bali, bersama ini kami sampaikan sebagai berikut :

1. Pemerintah Provinsi Bali mendukung penuh keterbukaan informasi publik sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali adalah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan informasi publik termasuk menyediakan informasi berklasifikasi terbuka dan tertutup.
3. Nomor telepon pribadi adalah salah satu data pribadi yang wajib dilindungi sehingga tidak mengganggu kenyamanan bagi pemiliknya dikemudian hari. Data pribadi hanya bisa diminta langsung kepada yang bersangkutan dan hanya bisa diberikan apabila bersangkutan mengizinkan (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf h). Untuk itu permohonan data yang berisikan list nomor telepon ASN Pemerintah Provinsi Bali **belum dapat kami penuhi**.

Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya disampaikan terimakasih.

KEPALA DINAS
Selaku PPID Utama,
GEDE PRAMANA
NIP. 19680531 199703 1 002

